

MENCEGAH PERKEMBANGAN POPULISME ISLAM: ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP NARASI MENTERI AGAMA TENTANG RADIKALISME DI INDONESIA

Bagas Teguh Pratista¹
Universitas Padjadjaran
email: bagas19008@mail.unpad.ac.id

Ari Ganjar Herdiansah²
Universitas Padjadjaran

Diterima: 16 November 2022

Disetujui: 21 Desember 2022

Dipublikasikan: 26 Desember 2022

Abstract

Islamic populism has become a stronger narrative in political contestation in Indonesia in line with the rise of Islamic mass mobilization in various political momentums. This article analyzes the narration of the minister of religion, Gus Yaqut, in the Interfaith National Gathering Webinar by Polda Metro Jaya on 27 December 2020 which said that Islamic populism must be prevented from developing. This type of research is a literature study, the nature of the research is qualitative which describes critical discourse on the narrative of the minister of religion, using a critical discourse analysis approach from Norman Fairclough, this article seeks to elaborate on linguistic aspects in the context of ideology and interests, actors, and social practices that lie behind the narrative. The results of this study indicate that the discourse of Islamic populism in Gus Yaqut's narrative cannot be separated from the government's efforts to eradicate radical and intolerant groups which are also related to resistance to opposition from conservative Islamic groups. In another aspect, it was found that the narrative has a correlation with the contestation of interests between traditional Islamic groups (Nahdlatul Ulama) which tend to be close to government coalitions and Islamic groups which show an oppositional attitude.

Keywords: *Islamic Populism, Indonesia, Critical Discourse Analysis, Radicalism*

Abstrak

Populisme Islam menjadi narasi yang menguat dalam kontestasi politik di Indonesia sejalan dengan maraknya mobilisasi massa Islam dalam berbagai momentum politik. Artikel ini menganalisis narasi menteri agama, Gus Yaqut, dalam Webinar Silaturahmi Nasional Lintas Agama oleh Polda Metro Jaya pada 27 Desember 2020 yang mengatakan bahwa populisme Islam harus dicegah perkembangannya. Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka, sifat penelitian merupakan kualitatif yang menggambarkan wacana kritis terhadap narasi menteri agama, menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dari Norman Fairclough, artikel ini berupaya mengelaborasi aspek kebahasaan dalam konteks ideologi dan kepentingan, aktor, dan praktik sosial yang melatarbelakangi narasi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus

populisme Islam dalam narasi Gus Yaquut tidak dapat dipisahkan dengan upaya pemerintah dalam memberantas kelompok-kelompok radikal dan intoleran yang juga terkait perlawanan terhadap oposisi dari kelompok-kelompok Islam konservatif. Pada aspek lain, ditemukan bahwa narasi tersebut memiliki korelasi dengan kontestasi kepentingan antara kelompok Islam tradisional (Nahdlatul Ulama) yang cenderung dekat dengan koalisi pemerintah dengan kelompok-kelompok Islam yang menunjukkan sikap oposisi.

Kata Kunci: Populisme Islam, Indonesia, Analisis Wacana Kritis, Radikalisme

A. PENDAHULUAN

Istilah populisme sering digunakan dalam gambaran tentang peristiwa-peristiwa politik yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai negara. Bahkan perkembangannya melebihi perkembangan suatu ideologi yang berkembang di negara tersebut. Keberadaannya sangat mudah ditemukan karena dapat beradaptasi dengan berbagai ideologi manapun. Ini disebabkan karena populisme sering juga dianggap sebagai ideologi yang “thin” karena mampu memasuki berbagai spektrum ideologi manapun.¹ Tidak terlepas baik ideologi berspektrum kanan maupun kiri. Seperti halnya di Eropa Barat, Populisme sering menampakkan diri pada gerakan-gerakan partai politik yang berada di spektrum kanan. Akan tetapi, di Amerika Latin populisme sering menampakkan diri pada partai-partai politik spektrum kiri.²

Pada tataran teoritis, populisme tidak memiliki definisi yang pakem. Para sarjana memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai apa itu populisme. Mereka masih memperdebatkan mengenai populisme itu apa sehingga tidak ada definisi yang ajeg yang dapat menjelaskan mengenai populisme. Benjamin Moffitt memiliki pandangan bahwa populisme merupakan bagian dari gaya politik seorang populis yang berfokus pada bentuk performa dan ekspresinya.³ Sedangkan, Kurt Weyland mengartikan bahwa populisme merupakan strategi politik para aktor yang dianggap populis yang berfokus pada cara bagaimana agar dapat meraih kekuasaan dengan berbasis pada banyaknya dukungan yang diperoleh tanpa adanya bentuk mediasi oleh aktor populis tersebut.⁴

¹ Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, “Populism: A Very Short Introduction” (New York, 2017).

² Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, “Voices of the People: Populism in Europe and Latin America Compared” (South Bend, Indiana, June 2011), <https://www.researchgate.net/publication/265106779>.

³ Benjamin Moffitt, *The Global Rise of Populism* (Stanford University Press, 2016), <https://doi.org/10.2307/j.ctvqsd8>.

⁴ Kurt Weyland, “Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics,” *Comparative Politics* 34, no. 1 (October 2001): 1–22, <https://doi.org/10.2307/422412>.

Ernesto Laclau mencoba untuk memberi ringkasan terhadap kompleksitas populisme dengan berpijak pada empat karakter dasarnya. Pertama, bahwa populisme selalu hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok *status quo*. Kedua, didasarkan pada sikap tidak percaya terhadap para pelaku politik. Ketiga, tuntutan populisme berpijak pada perasaan sebagai bagian dari suatu massa. Keempat, populisme selalu merepresentasikan disposisi anti-intelektualitas.⁵ Empat karakter ini memberi asumsi bahwa populisme merupakan bentuk dari perjuangan politik identitas dari mereka yang terpinggirkan atau termarginalkan oleh struktur kekuasaan yang dominan. Dalam arti lain, populisme dapat dimaknai sebagai sekelompok massa ataupun orang-orang yang meyakini telah berada pada kondisi pemerintahan atau para elite yang korup. Jika demikian, maka hal ini secara otomatis digunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap para elite atau pemerintahan yang dinilai korup.

Ada pemahaman Ideologi sebagai media mengenai aksi terorisme Mei 2018, apabila Kompas sifatnya kapital dengan memakai judul yang menarik pada pemberitaan dan isi beritanya terkesan negatif pada keluarga pelaku aksi teror. Sedangkan Republika selain kapital juga bersifat sosialisme, hal ini ditunjukkan dengan adanya salah satu pemberitaan yang berisikan anak pelaku teror dan memberikan kesan positifnya. Kajian Laeli Mu'miyani "Wacana Radikalisme dan Terorisme di Media Online (Analisis Wacana Kritis Van Jick terhadap pemberitaan Radikalisme dan Terorisme di Kompas dan Republika Online)". Hasil penelitian ini mengungkapkan radikalisme yang berujung terorisme, terutama terorisme modern lahir pada tahun 1970-an, yang diwacanakan oleh media online guna mengetahui isi teks dan pesan yang disampaikan.⁶

Di Indonesia, perkembangan populisme dewasa ini ditandai oleh mobilisasi politik kelompok-kelompok Islam, sehingga istilah populisme Islam menjadi sentral pembahasan politik. Sejalan dengan pandangan Laclau, Vedi Hadiz mengartikan Populisme sebagai bentuk respon perlawanan kelompok yang tertindas kepada para elite. Akan tetapi berhubung ada penambahan kata Islam, maka Vedi Hadiz hanya merubah konsep 'The People' atau kelompok yang berada pada populisme diganti dengan 'Ummah' yang menjadi representasi kelompok Islam yang dinilai telah tertindas dan terpinggirkan oleh para elite yang sewenang-wenang.⁷ Karenanya, bentuk perjuangan untuk melawan elite yang semena mena dapat dilakukan melalui ummah yang dalam

⁵ Barbara Wejnert, "Populism and Democracy: Not the Same but Interconnected," 2014, 143–161, <https://doi.org/10.1108/S0895-993520140000022006>.

⁶ (Laeli Mu'miyani, p. 5)

⁷ Vedi R Hadiz, *Populisme Islam Di Indonesia Dan Timur Tengah*, I (Depok: LP3ES, 2019).

konteks Indonesia memiliki basis massa yang sangat banyak.

Namun, populisme Islam sering digunakan oleh para elite politik sebagai cara yang mudah dalam memperoleh banyak suara di pemilu. Ini sangatlah masuk akal mengingat jumlah penganut agama Islam di Indonesia menjadi yang mayoritas. Di saat menjelang pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden, banyak para calon anggota legislatif ataupun kandidat presiden dan kepala daerah yang mendekati ke berbagai kelompok Islam agar mendapatkan dukungan politik. Contohnya saat pemilihan presiden 2019, kedua pasangan calon menggunakan populisme Islam sebagai salah satu caranya dalam menggalang dukungan suara.⁸ Demikian pula pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Melalui Aksi Bela Islam yang dilakukan secara berjilid-jilid, kelompok Islam menolak atas dipimpin kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan alasan telah menistakan agama Islam melalui pidatonya di Kepulauan Seribu yang dianggap melecehkan kitab suci Al Quran. Ini memberi peluang bagi Anies Baswedan sebagai lawan politiknya dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan menggunakan basis massa melalui populisme Islam sebagai strategi politiknya. Fenomena ini membuktikan bahwa di Indonesia, identitas agama (dalam hal ini Islam) dapat menjadi basis kekuatan baru yang mampu digunakan dalam memobilisasi kekuatan politik.⁹ Meskipun tuntutan utamanya ingin memjarakan Basuki Tjahaja Purnama, akan tetapi anggota tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, Kapitra Ampera secara terang-terangan menjelaskan bahwa Aksi 212 merupakan bagian dari acara politik yang bertujuan agar umat Islam sadar dalam memilih pemimpin yang juga harus berasal dari umat Islam.¹⁰

Menariknya, meskipun populisme Islam digunakan untuk kepentingan menarik dukungan politik, istilah tersebut juga dipandang secara peyoratif dalam narasi politik yang telah luas. Sebagai contoh, Gus Yaquut sebagai Menteri Agama sempat mengeluarkan pernyataan agar eksistensi populisme Islam di Indonesia dicegah perkembangannya.¹¹ Gus Yaquut menginginkan agar populisme Islam di Indonesia tidak semakin meluas dan berkembang. Narasi tersebut disampaikan dalam acara Webinar Silaturahmi Nasional Lintas Agama oleh Polda Metro Jaya

⁸ Andi Eka Putra, "Populisme Islam: Tantangan Atau Ancaman Bagi Indonesia?," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 15, no. 2 (March 3, 2020): 218–227.

⁹ Ranga Kusumo and Hurriyah Hurriyah, "Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPf-MUI Tahun 2016-2017," *Jurnal Politik* 4, no. 1 (August 2018): 87–113, <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172>.

¹⁰ Rohmatin Bonasir, "Dengan 212, Umat Islam 'Ingin Berkuasa Lewat Pilkada, Pemilu Dan Pilpres,'" *bbc*, December 1, 2017.

¹¹ Eko Ari Wibowo, "Menteri Agama Gus Yaquut: Saya Tidak Ingin Populisme Islam Berkembang Luas," *nasional.tempo*, December 27, 2020.

pada 27 Desember 2020. Menurut Gus Yaqut, Populisme Islam dipandang sebagai bentuk dari pemahaman yang ingin menjadikan agama sebagai norma konflik. Menurut Profesor riset bidang sosiologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Endang Turmudzi, norma konflik yang dimaksud cenderung mendekati pada pemahaman kelompok radikalisme/ekstrimisme Islam.¹² Pandangan tersebut didasarkan pada keberadaan gerakan politik Islam seperti Aksi Bela Islam yang diikuti oleh beberapa sentimen yang cenderung intoleran dan mengandung unsur kebencian, seperti anti-kafir, anti-china, anti asing.¹³ Sentimen ini dinilai sebagai bentuk radikalisme dan ekstrimisme sehingga dapat membahayakan bagi pluralisme yang telah berkembang di Indonesia.

Wacana tentang populisme Islam menjadi kontroversi dalam perbincangan politik di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baidlowi mendukung pernyataan Gus Yaqut dan menilai bahwa perkembangan populisme Islam harus dapat dicegah. Menurutnya, populisme islam akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia karena populisme islam mengandung muatan politik identitas.¹⁴ Pandangan lain berasal dari mantan Sekretaris Jenderal PBNU Endang Turmudzi yang berpendapat bahwa populisme islam merupakan bagian dari demokrasi sehingga tidak berbahaya¹⁵. Dian Dwi Jayanto menilai bahwa pernyataan tersebut bermuatan kepentingan politik dan mencoba untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok Islam yang berpandangan keras.¹⁶ Narasi menentang populisme Islam yang dilontarkan oleh Gus Yaqut juga memiliki kaitan dengan kepentingan ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai bagian dari NU, pernyataan Gus Yaqut dianggap merepresentasikan kepentingan ormas tersebut yang selama ini bertentangan dengan kelompok-kelompok Islamis. Karena itu, artikel ini berargumen bahwa narasi Menteri Agama tentang populisme Islam bermuatan pertentangan ideologis dan kepentingan di antara kelompok-kelompok Islam. Sebuah narasi yang dinyatakan oleh tokoh tidak berdiri sendiri melainkan terhubung dengan konteks sosial politik. Indikasi pertentangan di antara NU dan kelompok-kelompok Islam garis keras dapat ditelusuri setidaknya pada peristiwa penistaan agama oleh Ahok. Pada waktu itu, GNPf-Ulama menggerakkan massa dalam memprotes pemerintah yang dianggapnya pro kepada Ahok. Sementara itu, NU berada

¹² Cnnindonesia, "Pakar LIPI Sebut Menag Yaqut Salah Pahami Soal Populisme Islam," cnnindonesia, December 28, 2020.

¹³ Putra, "Populisme Islam: Tantangan Atau Ancaman Bagi Indonesia?"

¹⁴ Cnnindonesia, "PBNU Dukung Menag Yaqut Soal Cegah Populisme Islam," cnnindonesia, December 29, 2020.

¹⁵ R53, "Menag Yakut Tidak Pahami Populisme Islam?," pinterpolitik, December 28, 2020.

¹⁶ Dian Dwi Jayanto, "Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU)," *Jurnal Filsafat* 29, no. 1 (February 2019): 1–25.

dalam posisi yang dekat dengan pemerintah. NU justru melarang umat Islam, khususnya jamaah NU, untuk ikut dalam Aksi Bela Islam. Pada Pilpres 2019, keduanya memiliki pilihan kandidat yang berbeda.

Berfokus pada narasi populisme Islam yang disampaikan menteri agama, artikel ini mencoba menganalisisnya secara kritis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Secara khusus, artikel ini mempertanyakan makna apa yang dibangun dalam narasi populisme Islam dari Gus Yaqut tentang kelompok-kelompok radikal mengingat wacana radikal juga sering dijadikan oleh penguasa dalam mereduksi kelompok anti-pemerintah? Apakah narasi tersebut mengandung kepentingan untuk melawan eksistensi kelompok-kelompok Islamis yang selama ini cenderung menentang pemerintahan Jokowi mengingat beberapa kelompok Islam yang dianggap menyimpang seperti FPI atau HTI telah dibubarkan oleh pemerintah? Ataukah mengandung kepentingan kelompok mengingat Gus Yaqut yang menjadi dari NU selama ini sedang mengalami perang wacana dengan GNPF-Ulama?.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka, sifat penelitian merupakan kualitatif yang menggambarkan wacana kritis terhadap narasi menteri agama, menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dari Norman Fairclough, artikel ini berupaya mengelaborasi aspek kebahasaan dalam konteks ideologi dan kepentingan, aktor, dan praktik sosial yang melatarbelakangi narasi tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populisme Islam di Indonesia

Di Indonesia, populisme Islam bukan menjadi sesuatu hal yang baru. Eksistensinya sudah ada sejak masa pra kemerdekaan Indonesia. Ini ditandai dengan kemunculan populisme Islam yang dimotori oleh organisasi Syarikat Dagang Islam (SDI). Tujuannya agar umat Islam dapat menguasai kekuasaan ekonomi di Indonesia yang pada saat itu merupakan basis kekuasaan yang dipegang oleh pengusaha Tionghoa. Hal ini menjadi alasan bahwa Populisme Islam dibentuk untuk kepentingan ekonomi. Vedi Hadiz menyebutnya sebagai bentuk dari Populisme Tradisional atau

Populisme Lama. Perkembangannya juga berlangsung pada masa Orde Lama dan Orde Baru.¹⁷

Di era reformasi, populisme Islam sudah tidak lagi berorientasi pada kekuasaan ekonomi, melainkan telah bergeser pada upaya dalam meraih kekuasaan politik. Vedi Hadiz menyebutnya sebagai bentuk dari Populisme Islam Baru. Puncaknya terjadi pada saat Aksi Bela Islam yang dilatarbelakangi oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah menistakan kitab suci umat Islam. Aksi ini diklaim mampu memobilisasi jutaan umat Islam dari berbagai daerah dan berkumpul di Monas. Aksi Bela Islam juga didorong atas pernyataan Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin yang mengeluarkan pernyataan sikap atau fatwa bahwa pernyataan Basuki Tjahaja Purnama telah dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan terhadap Al Quran dan sekaligus penghinaan terhadap ulama, sehingga memiliki konsekuensi hukum.¹⁸ Ini membuat Umat Islam yang tergabung dalam aksi tersebut menamakan dirinya sebagai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI). Beberapa Ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI) menjadi pelopor Aksi Bela Islam.

Pada perkembangannya, Aksi Bela Islam mengalami pergeseran dari awalnya menuntut adanya keadilan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama menjadi ajakan kepada umat Islam, khususnya DKI Jakarta agar menjadi anti-gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ini mengindikasikan bahwa ajakan tersebut mengarah kepada tindakan agar tidak memilih Ahok yang menjadi petahana pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Beberapa ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menolak ajakan tersebut dan menilai bahwa kegiatan ini rentan ditunggangi oleh kepentingan politik. Apalagi, aksi tersebut dilakukan pada saat mendekati pencoblosan pilkada 2017. Bahkan, NU mengeluarkan surat pernyataan agar melarang umat Islam, khususnya warga NU untuk mengikuti Aksi Bela Islam di Jakarta. Hal ini juga dilakukan oleh GP Ansor melalui ketua umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas yang mengeluarkan instruksi kepada anggotanya untuk tidak terlibat pada Aksi Bela Islam.

Nahdlatul Ulama tidak melibatkan diri pada Aksi Bela Islam karena menilai bahwa kasus Ahok sudah menjadi persoalan hukum dan sedang diproses secara hukum. Menurut Ketua PBNU, Marsudi Syuhud bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa NU sebagai Ormas Islam yang menjadi perekat kehidupan berbangsa tidak ingin atas dasar alasan kasus yang menimpa Ahok menjadi masalah yang mampu memecah belah

¹⁷ Usman Kansong, "Populisme Islam," *mediaindonesia*, January 5, 2021.

¹⁸ Indah Mutiara Kami, "MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, Ini Isinya," *news.detik*, October 11, 2016.

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap ini menunjukkan sikap yang moderat dan dinilai sejalan dengan keinginan pemerintah.

Sikap NU yang kontra terhadap Aksi Bela Islam semakin ditunjukkan pada perdebatan hukum melaksanakan salat Jumat di tempat terbuka. Menurut Said Aqil Siroj bahwa hukum salat Jumat di tempat terbuka berdasarkan mazhab Imam Syafi’I dan Hambali itu tidak sah.¹⁹ Sementara itu, Habib Rizieq membantah pernyataan tersebut dengan berpijak pada Kitab *al-Majmu’ Syahrul Muhadzab* dan menyatakan bahwa salat Jumat di jalan protokol hukumnya sah dan tidak haram.

Dinamika tersebut mengindikasikan adanya perang wacana antara para elite Nahdlatul Ulama yang pro pemerintah dengan kelompok ataupun aktor-aktor yang tergabung ke dalam GNPF-Ulama. Puncaknya terjadi pada saat pemilihan presiden 2019 dimana keduanya memiliki pilihan yang berbeda. Tujuan adanya kontestasi tersebut adalah agar dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dalam menilai kelompok mana yang sebenarnya merepresentasikan umat Islam dengan membangun wacana untuk mengukuhkan dirinya sebagai Populisme Islam di Indonesia. Menurut Jayanto (2019) adu wacana yang dilakukan oleh GNPF-Ulama dan Nahdlatul Ulama dimenangkan oleh GNPF-Ulama.²⁰ Ini disebabkan karena keberhasilan GNPF-Ulama dalam memobilisasi massa. Bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hadiz dan Rakhmani, bahwa sebanyak 60% dari 600 responden yang ikut dalam Aksi Bela Islam memiliki afiliasi dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.²¹

Meskipun konstetasi diantara keduanya hingga saat ini tetap berlangsung, akan tetapi, menariknya Ormas Islam yang tergabung dalam GNPF-Ulama justru dibubarkan oleh pemerintah. Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan pada 30 Desember 2020. Menurut Mahfud MD, bahwa FPI dibubarkan karena tidak bersedia mengikuti Undang-Undang yang berlaku.²² Ini semakin mereduksi kekuatan kelompok Islam yang terafiliasi dalam GNPF-Ulama. Namun, hal sebaliknya justru terjadi pada NU. Penunjukkan Gus Yaquut sebagai Menteri Agama pada 22 Desember 2020 menjadi basis kekuatan NU dalam menghadapi perang wacana tersebut. Sangatlah menarik penunjukkan Menteri Agama Gus Yaquut terhadap korelasi dengan perkembangan Populisme Islam

¹⁹ Jayanto, “Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU).”

²⁰ Ibid.

²¹ Vedi R Hadiz and Inaya Rakhmani, “Marketing Morality in Indonesia’s Democracy,” Asian Studies Association of Australia, December 21, 2017.

²² Riezky Maulana, “Mahfud MD Buka-Bukaan Alasan Pemerintah Bubarkan FPI,” nasional.sindonews, January 13, 2021.

di Indonesia.

Relasi Kuasa dalam Wacana Populisme Islam

Wacana Populisme Islam mampu menyedot perhatian pejabat politik di pemerintahan. Ini dibuktikan dengan adanya narasi populisme Islam oleh menteri agama, Gus Yaqut, pada saat acara Webinar Silaturahmi Nasional Lintas Agama oleh Polda Metro Jaya pada 27 Desember 2020. Gus Yaqut mengatakan bahwa dirinya ingin mencegah perkembangan populisme Islam di Indonesia. Menarik untuk disimak bagian dari paparan yang disampaikan oleh Gus Yaqut terkait pencegahan perkembangan populisme Islam di Indonesia:

“Saya tentu tidak akan menyampaikan banyak hal. Saya ingin mengulang apa yang kemarin saya katakan, atau saya sampaikan ketika saya diberikan kesempatan pertama oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menyampaikan pidato di depan seluruh masyarakat Indonesia.”

“Saya mengajak kita semua menjadikan agama sebagai inspirasi bukan sebagai aspirasi. Itu apa artinya, yang paling sederhana adalah kita sekarang merasakan, tahun tahun belakangan ini kita merasakan bagaimana itu sudah atau ada berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahasa yang paling ekstrim itu siapapun yang berbeda dengan keyakinannya itu mereka dianggap lawan atau musuh. Karena namanya musuh atau lawan itu harus diperangi. Itu adalah norma yang kemarin yang sempat berkembang yang kita dengar atau istilah kerennya mbak lisa itu populisme Islam.”

“Saya tidak ingin, kita semua tentunya tidak ingin populisme islam itu berkembang, berkembang luas sehingga kita kewalahan untuk menghadapinya. Maka di pidato pertama saya sampaikan, mari kita semua menjadikan agama ini sebagai inspirasi (sumber inspirasi) bukan sebagai aspirasi. Dan aspirasi agama ini kalo salah salah orang orang akan sangat berbahaya”

“Berkali kali di banyak kesempatan pun meskipun posisinya sudah berbeda. Dulu ketika aktif di gerakan pemuda ansor dan banser. Saya selalu katakan, bahwa tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, tidak ada kristen, tidak ada katolik, tidak ada hindu, tidak

ada buddha, tidak konghucu. Tidak ada agama agama lokal yang lain. Indonesia itu berdiri berdasarkan kesepakatan antar kultur, antar budaya dan antar agama yang ada di Indonesia ini. Jadi barangsiapa yang ingin menghilangkan antara satu dengan yang lain atas dasar agama, maka artinya mereka tidak mengakui Indonesia. Mereka tidak memiliki rasa keIndonesiaan. Saya dalam bahasa yang keras ketika masih menjadi komandan banser itu, saya bilang ketika ada yang begitu kita lawan.”

Dari paparan di atas, menarik untuk diketahui wacana apa yang telah dikonstruksi oleh Gus Yaquut dalam narasi tersebut. Meminjam alat analisis Norman Fairclough, kami mencoba menganalisis makna apa yang hendak dibangun oleh Gus Yaquut sehingga dapat menunjukkan relasi kuasa di antara pihak-pihak yang terkait dalam wacana tersebut. Dalam rangka melakukan analisis lebih lanjut, pembahasan berikutnya dibagi berdasarkan tiga dimensi analisis yakni Pertama, Analisis Teks yang mencoba menganalisis dengan pendekatan isi teks, dalam hal ini maka tertuju pada *script* pernyataan Gus Yaquut. Dalam Analisis Teks terbagi lagi kedalam tiga unsur yang dianalisisnya yakni representasi teks, relasi dan identitas. Representasi teks, bagian yang bertujuan untuk melihat bagaimana seseorang atau kelompok itu ditampilkan oleh produsen teks, sehingga dalam narasi tersebut kelompok atau siapa saja yang akan ditampilkan oleh Gus Yaquut, dan direpresentasikan sebagai kelompok yang bagaimana oleh Gus Yaquut. Relasi ditunjukkan untuk melihat bagaimana produsen teks mengkonstruksi sebuah hubungan dengan konsumen teks, dalam hal ini maka bagaimana posisi Gus Yaquut membangun relasinya dengan para khalayak. Apakah memiliki relasi yang sejajar ataukah berbeda. Identitas ditunjukkan untuk melihat bagaimana produsen teks mengkonstruksi identitas dirinya, dalam hal ini berisi bagaimana dalam isi narasi tersebut, Gus Yaquut menampilkan identitasnya terhadap para khalayak dalam konteks yang terkait dengan isi narasi tersebut.

Kedua, Analisis Praktik Diskursus yaitu menitikberatkan pada analisis bagaimana suatu wacana itu diproduksi oleh si pembuat teks dan dikonsumsi oleh para khalayak. Analisis ini melihat bagaimana klaim kebenaran dapat diwacanakan oleh Gus Yaquut dalam mewacanakan istilah Populisme Islam dan bagaimana respon klaim kebenaran tersebut bagi para konsumsi teks. Ketiga, Analisis Sosio-Kultural merupakan analisis yang mencoba melihat dari sisi yang lebih makro yang dapat mempengaruhi munculnya teks atau narasi tersebut. Pernyataan Gus Yaquut tidak akan muncul tanpa adanya situasi yang mendukung, oleh sebab itu pada analisis ini mencoba untuk

melihat keadaan diluar teks yang dapat memicu adanya pernyataan tersebut serta dapat menjadi penguat dalam menganalisis makna isi teks atau sebuah pernyataan.

Representasi Teks

Analisis yang digunakan berasal dari anak kalimat yang mana dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana teks tersebut direpresentasikan. Dalam pernyataannya, Gus Yaquut setidaknya memberi pernyataan-pernyataan yang secara implisit merepresentasikan terhadap munculnya kelompok radikalisme.

Tabel 1 Penafsiran dari Pernyataan pada Aspek Representasi Teks

Pernyataan	Penafsiran
<i>"..tahun-tahun belakangan ini kita merasakan bagaimana agama itu sudah atau ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik"</i>	Kalimat <i>Agama menjadi norma konflik</i> dapat merujuk pada pemahaman radikalisme.
<i>"..Kita semua tentunya tidak ingin populisme islam itu berkembang"</i>	Kalimat ini masih memiliki korelasi dengan pernyataan pertama dan membungkus kelompok yang menjadikan agama sebagai norma konflik kepada kalimat "Populisme Islam". Selain itu, kalimat ini juga memberi makna pada peristiwa yang sedang terjadi yang dinilai telah mengalami politisasi agama
<i>"Tahun-tahun belakangan ini..."</i>	Kalimat ini menunjukkan situasi yang digambarkan sedang terjadi dan dapat ditafsirkan pada fenomena Aksi Bela Islam.
<i>"Agama menjadi norma konflik ..."</i>	Kalimat ini dapat ditafsirkan pada kelompok FPI pada saat Aksi Bela Islam
<i>"...Saya tidak ingin, kita semua tentunya tidak ingin populisme islam itu berkembang, berkembang luas sehingga kita kewalahan untuk menghadapinya..."</i>	Makna <i>saya</i> dalam kalimat ini dapat ditafsirkan kedalam posisi Gus Yaquut yang ingin ditampilkan sebagai protagonis. Makna <i>kita</i> menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya mewakili narasi besar negara dan idealitas nasionalisme yang secara tidak langsung mengkontraskan lawan-

lawannya sebagai anti-nasionalis. Kalimat *kita kewalahan untuk menghadapinya* bermakna sebagai bentuk ancaman yang cukup besar dan perlu disikapi dengan serius

Ini didasarkan pada pernyataan “*tahun-tahun belakangan ini kita merasakan bagaimana agama itu sudah atau ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik*”. Menurut Profesor Riset Bidang Sosiologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Endang Turmuzdi, penggalan kalimat *agama menjadi norma konflik* merujuk dan mendekati pada paham radikalisme.²³ Namun, secara eksplisit narasi Gus Yaquut jelas memberi maksud kepada kelompok Islam secara luas yang dikemas dalam kata-kata *Populisme Islam* melalui penggalan “*Kita semua tentunya tidak ingin populisme islam itu berkembang*”. Penggalan kalimat tersebut juga memberi representasi peristiwa yang sedang mengalami politisasi agama. Kalimat “*Tahun-tahun belakangan ini*” dan “*Agama menjadi norma konflik*” menegaskan bahwa situasi atau peristiwa yang terjadi pada saat itu mengalami bentuk adanya politisasi atas nama agama. Ini terindikasi kuat pada peristiwa Aksi Bela Islam yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Menurut Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Rumadi Ahmad bahwa Aksi Bela Islam memiliki kepentingan politik dibalikinya. Menurutnya, unsur politik sangat terasa pada saat adanya ajakan agar Ahok dicopot dari jabatannya.²⁴ Kalimat “*Agama menjadi norma konflik*” dapat mengacu pada kebangkitan FPI pada saat Aksi Bela Islam. Diketahui bahwa FPI merupakan salah satu ormas yang menginisiasi adanya Aksi Bela Islam. *Track record* yang dimiliki pun tercatat sebagai ormas yang radikal dan intoleran. Beberapa sikap seperti pada saat tabligh akbar ulang tahun FPI tahun 2002, menginginkan agar dalam pasal 29 UUD 1945 menambahkan syariat Islam didalamnya. Selain itu juga keterlibatannya pada penutupan klab malam dan tempat-tempat yang dianggap maksiat. Beberapa pihak menilai bahwa aksi ini dinilai sebagai tindakan yang main hakim sendiri dan justru membuat kegaduhan atau konflik.²⁵

Representasi lain juga ditunjukkan pada bentuk cap/gambaran yang dinilai sangat negatif.

²³ Cnnindonesia, “Pakar LIPI Sebut Menag Yaquut Salah Paham Soal Populisme Islam,” cnnindonesia, December 28, 2020.

²⁴ Egi Adyatama, “Aksi 212, NU Imbau Warganya Tak Ikut Aksi Karena Politis,” tempo, February 20, 2017.

²⁵ Sinarpost, “Kembali Terancam Dibubarkan, Ini Sejarah Dan Track Record FPI,” Sinarpost, November 21, 2020.

Ini terlihat pada penggalan “*Saya tidak ingin, kita semua tentunya tidak ingin populisme islam itu berkembang, berkembang luas sehingga kita kewalahan untuk menghadapinya.*” Dalam anak kalimat ini, jelas bahwa Gus Yaqut memberikan representasi bahwa kata *saya* ditunjukkan pada posisinya sebagai yang protagonis dan kelompok-kelompok yang berseberangan dengannya di Aksi Bela Islam sebagai radikal dan intoleran. Makna *kita* menekankan bahwa apa yang disampaikan merepresentasikan narasi besar negara dan idealitas nasionalisme yang secara tidak langsung mengkontraskan lawan-lawannya sebagai anti-nasionalis. Kalimat “*tidak ingin berkembang*” dan “*kita kewalahan untuk menghadapinya*”, menunjukkan bahwa apabila hal tersebut dibiarkan berkembang, maka akan ada ancaman yang cukup besar. Dengan hal ini maka pencegahan perlu dilakukan dan perlu disikapi dengan serius. Ini dapat dimaknai sebagai tindakan yang hendak membatasi pergerakan suatu kelompok tersebut.

Analisis lain juga ditunjukkan melalui pembacaan terhadap kombinasi anak kalimat yang membentuk koherensi lengkap tentang makna apa yang hendak disampaikan oleh si pencipta teks tersebut. Gus Yaqut mencoba menunjukkan bagaimana populisme Islam akan melahirkan suatu masalah sosial yang dapat berbahaya dan akan merugikan masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama diluar Islam.

Tabel 2 Penafsiran dari Pernyataan pada Aspek Representasi Teks Kombinasi Anak Kalimat

Pernyataan	Penafsiran
a. “ <i>Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahasa yang paling ekstrim itu siapapun yang berbeda dengan keyakinannya itu mereka dianggap lawan atau musuh. Dan ini telah ada dalam populisme Islam.</i> ”	Pada kalimat “ <i>siapapun yang berbeda dengan keyakinannya itu mereka dianggap lawan atau musuh</i> ” menunjukkan bahwa kelompok yang dimaksud merupakan kelompok yang intoleran.
b. “ <i>Kita semua tentunya tidak ingin populisme Islam itu berkembang, berkembang luas sehingga kita kewalahan untuk menghadapinya.</i> ”	Kata mereka dalam kalimat ini ditunjukkan pada kelompok barisan Aksi Bela Islam 212

Kombinasi anak kalimat tersebut semakin menggambarkan bahwa kelompok populisme Islam dicap sebagai kelompok yang radikal dan intoleran. Intoleran didapat dari representasi kalimat “*Siapapun yang berbeda dengan keyakinannya itu mereka dianggap lawan*”. Kalimat

tersebut menunjukkan bahwa predikat kata *mereka* menunjukkan kelompok yang berada pada barisan Aksi Bela Islam 212 dianggap sebagai musuh negara dan juga masyarakat karena membahayakan. Korelasi dengan kalimat kedua dituangkan dalam eksistensi populisme Islam yang telah mendapatkan cap negatif dan memerlukan upaya untuk membatasi perkembangan pergerakannya.

Aspek Identitas

Tabel 3 Penafsiran dari Pernyataan pada Aspek Identitas

Pernyataan	Penafsiran
<i>“..Saya sampaikan ketika saya diberikan kesempatan pertama oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menyampaikan pidato di depan seluruh masyarakat Indonesia”</i>	Kalimat ini dapat ditafsirkan terhadap identitasnya sebagai Menteri Agama.
<i>“..Berkali kali di banyak kesempatan pun meskipun posisinya sudah berbeda. Dulu ketika aktif di gerakan pemuda ansor dan banser”</i>	Kalimat ini secara jelas menerangkan identitasnya sebagai mantan Ketua Umum Pemuda Ansor.

Aspek ini menjelaskan mengenai bagaimana identitas sang pembuat narasi tersebut dikonstruksi dan ditampilkan. Dalam narasi Gus Yaqut setidaknya terdapat beberapa identitas yang dimunculkan pada narasi tersebut. Pertama, Gus Yaqut menampilkan identitas sebagai Menteri Agama. Ini tertuang pada penggalan kalimat *“Saya sampaikan ketika saya diberikan kesempatan pertama oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menyampaikan pidato di depan seluruh masyarakat Indonesia”*. Konteks kalimat tersebut menggambarkan pada saat Gus Yaqut dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama pada 22 Desember 2022, menggantikan Fachrul Rozi. Kedua, identitas yang ditampilkan sebagai mantan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor. Ini ditunjukkan pada penggalan kalimat *“Berkali kali di banyak kesempatan pun meskipun posisinya sudah berbeda. Dulu ketika aktif di gerakan pemuda ansor dan banser”*. Jika ditelusuri lebih mendalam, identitas tersebut juga menunjukkan adanya keterkaitannya dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Ini sangatlah menarik mengingat antara narasi yang dimunculkan dengan identitas yang ditampilkan. Identitasnya sebagai mantan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor dan

Menteri Agama memiliki relasi yang kuat dalam perang wacana dengan kelompok seperti FPI atau GNPF Ulama. Sehingga wajar saja apabila narasi membatasi populisme Islam dimunculkan.

Relasi atau Hubungan

Tabel 4 Penafsiran dari Pernyataan pada Aspek Relasi atau Hubungan

Pernyataan	Penafsiran
<i>“..Saya mengajak kita semua menjadikan agama sebagai inspirasi bukan sebagai aspirasi”</i>	Kalimat ini dapat dimaknai sebagai ajakan yang didalamnya mengandung relasi atau hubungan kedudukan yang setara antara Gus Yaqut sebagai Menteri Agama dengan masyarakat dalam melawan populisme Islam.

Elemen relasi berkaitan dengan bagaimana para partisipan dalam wacana tersebut memiliki hubungan. Dalam narasi Gus Yaqut terdapat partisipan yang terlibat dalam wacana tersebut yakni Gus Yaqut sebagai yang memproduksi teks, khalayak dan kelompok populisme Islam sebagai partisipan yang diwacanakan. Hubungan relasional yang dibangun menunjukkan bagaimana Gus Yaqut sebagai Menteri Agama memiliki relasi yang setara dengan masyarakat untuk berupaya mengajak partisipasi masyarakat (khalayak) dan semua elemen di dalamnya untuk bersama sama memerangi atau mencegah perkembangan populisme Islam yang dinilai dapat memunculkan radikalisme, bersikap intoleransi dan merusak kerukunan beragama di Indonesia. Ini terdapat dalam penggalan kalimat *“Saya mengajak kita semua menjadikan agama sebagai inspirasi bukan sebagai aspirasi”*. Melalui identitas yang ditunjukkan pada bagian analisis identitas, Gus Yaqut sebagai Menteri Agama memberi posisi relasi yang dimunculkan lebih menunjukkan suatu hegemoni terhadap istilah populisme islam dan menempatkan masyarakat juga memiliki peran yang sama seperti pemerintah dalam mencegah berkembangnya populisme Islam. Pihak yang memproduksi wacana lebih diuntungkan mengingat kedudukannya sebagai elit yang memiliki

kuasa.

Analisis Praktik Diskursus

Analisis Praktik Diskursus berbicara pada aspek bagaimana wacana tersebut diproduksi oleh pembuat wacana dan dikonsumsi oleh khalayak. Jika dilihat dari proses produksi teks, analisis yang digunakan dapat dilihat dari pengetahuan, identitas dan pengalaman si pembuat teks tersebut. Seperti kita ketahui bahwa sebelum menjadi Menteri Agama, Gus Yaqut menjabat sebagai ketua umum Gerakan Pemuda Ansor. Diketahui organisasi ini banyak terlibat dalam kegiatan pengamanan rumah ibadah dalam perayaan hari besar keagamaan di Indonesia. Ini dilakukan sebagai wujud dalam menangkal paham radikalisme yang berupaya merusak pluralisme di Indonesia.²⁶ Pengalaman secara tidak langsung memberikan pengetahuan Gus Yaqut akan pentingnya moderasi beragama dan memberikan suatu penegasan bahwa populisme Islam yang dimaksud Gus Yaqut mengarah kepada kelompok radikal. Apalagi jika melihat pada konteks kondisi narasi tersebut diproduksi, yang berada dalam kondisi diskusi lintas agama dalam platform webinar kepolisian. Keadaan demikian wajar muncul, karena disebabkan pada faktor kondisi yang majemuk dan lingkungan kepolisian yang sama sama memiliki kepentingan dalam memberantas pemahaman radikalisme ataupun terorisme. Sehingga semakin menguatkan mengapa wacana tersebut hadir.

Faktor identitas juga dapat mempengaruhi lahirnya narasi atau teks diproduksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Gus Yaqut dahulunya merupakan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor sekaligus menjadi komandan banser yang secara pengetahuan memiliki nilai nilai atau ideologi kelompoknya dalam menjaga nilai nilai persatuan dan keberagaman agama. Apalagi mengingat aliran keagamaan yang masih memiliki hubungan erat dengan Nahdlatul Ulama yang mengusung nilai nilai “Islam Nusantara” dan lebih condong pada nilai nasionalisme dan Islam. Adanya identitas tersebut seakan menguatkan mengapa teks tersebut muncul dan diproduksi. Selain itu, latar belakang lahirnya produksi narasi tersebut juga terindikasi karena adanya perang wacana antara GNPF-Ulama atau PA 212 dengan Nahdlatul Ulama.²⁷ Perang tersebut dihadirkan agar dapat memperlihatkan kelompok mana yang dinilai dapat merepresentasikan umat Islam. Atas dasar inilah, apalagi ditambah dengan kedudukannya yang strategisnya sebagai Menteri

²⁶ Ruchman Basori, “Mengapa Banser-Ansor Menjaga Gereja?,” jurnas, December 25, 2017.

²⁷ R53, “Menag Yakut Tidak Paham Populisme Islam?”

Agama melahirkan produksi wacana agar masyarakat bersama sama mencegah berkembangnya populisme Islam.

Diketahui bahwa semenjak adanya kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama telah melahirkan gerakan protes kelompok Islam yang dimotori oleh GNPf-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia). Dalam perkembangannya GNPf-MUI berubah menjadi GNPf-Ulama. Melalui Fatwa MUI Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan telah melakukan penistaan terhadap Al-Quran. Fatwa tersebut mampu merebut suara Islam dan memberi pengaruh bahwa aspirasinya merupakan bagian dari aspirasi umat Islam Indonesia. Upaya GNPf-Ulama dalam merebut hati umat Islam mendapat tantangan dari NU. Hal ini terlihat dengan adanya surat resmi untuk melarang warga NU dalam mengikuti Aksi Bela Islam.²⁸ Puncak pertarungan wacana terjadi pada saat Pemilihan Presiden 2019. GNPf-Ulama memiliki kedekatan dengan pasangan calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan melalui ijtima' ulama memberi rekomendasi untuk calon wakil presiden yang mendampinginya. Bahkan, GNPf-Ulama ikut mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo-Sandi. Sedangkan NU justru sebaliknya, dengan mendukung pasangan calon nomor urut satu Jokowi-Ma'ruf. Faktor utamanya disebabkan karena Ma'ruf Amin yang masih memiliki ikatan kuat dengan Nahdlatul Ulama. Hal ini mengindikasikan bahwa narasi Gus Yaquut soal populisme Islam masih memiliki ikatan kuat dengan pertarungan wacana tersebut, mengingat Gus Yaquut merupakan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor. Sehingga ini juga dapat menjadi penyebab mengapa narasi tersebut diproduksi.

Pada bagian konsumsi teks, penulis mencoba untuk melihat berbagai tanggapan dari masyarakat terhadap pernyataan dari Gus Yaquut. Diketahui sejak webinar ini diunggah di Youtube pada 27 Desember 2022 telah memiliki 13,598 *views* dan 34 komentar per tanggal 10 Juni 2022. Isi kolom komentar keseluruhannya tidak memiliki nuansa yang kontra atau mencela pernyataan Gus Yaquut, justru mendukung Polda Metro Jaya sebagai pihak penyelenggara dalam menyelenggarakan webinar ini. Ada yang memberikan dukungan terhadap wacana tersebut karena dinilai sebagai hal yang harus sama-sama dicegah perkembangan populisme Islam, karena mampu mengarah pada hal yang radikal.

Namun sebaliknya, justru tidak sedikit yang menentang pernyataan tersebut. Aktor yang dinilai sangat kontra dengan narasi Gus Yaquut yaitu Fadli Zon. Diketahui bahwa Fadli Zon

²⁸ Jayanto, "Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU)."

merupakan politikus dari Partai Gerindra. Ia menilai bahwa pernyataan Gus Yaqut telah melintir makna sesungguhnya Populisme Islam yang disama artikan dengan radikal. Bahkan Fadli Zon secara terang-terangan mengajak Gus Yaqut untuk berdebat mengenai Populisme Islam.²⁹ Professor Endang Turmudzi menilai bahwa seolah olah pemaknaan populisme Islam oleh Gus Yaqut mengindikasikan bahwa populisme Islam sama dengan terorisme. Beliau menilai bahwa populisme merupakan bagian dari demokrasi.³⁰ Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad merespon bahwa narasi tersebut justru memperkeruh suasana. Ia menyarankan bahwa dalam memerangi populisme Islam yang didasari pada kelompok radikal atau intoleran haruslah dihadapi melalui narasi yang santun.³¹

Analisis Praktik Sosio-Kultural

Pada tanggal 22 Desember 2020, Gus Yaqut dilantik sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Rozi. Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid bahwa pencopotan Fachrul Rozi diduga karena telah memberi lampu hijau untuk FPI. Alasan tersebut diperkuat dengan absennya Fachrul Rozi saat masih menjadi Menteri Agama dalam memberi pernyataan bersama pembubaran FPI.³² Secara Situasional, kejadian tersebut dapat memperkuat munculnya narasi *populisme Islam harus dicegah perkembangannya*. Apalagi waktu dilantiknya Gus Yaqut dengan munculnya narasi tersebut hanya berselang beberapa hari saja. Memang kemunculan disebabkan karena merebaknya kondisi politisasi agama di Indonesia. Termasuk juga pada masalah FPI. Asumsi lain mengenai situasional yang mendukung lahirnya wacana tersebut disebabkan karena adanya aksi 212 pada tahun 2016 lalu yang telah berhasil memobilisasi massa untuk bersama sama mengawal isu Ahok.³³ Ini juga yang mampu memberikan kemenangan bagi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian juga ditandai dengan kemunculan kembali pada setiap kegiatan alumni 212. Kemunculan pamungkasnya pada saat pemilu pilpres 2019. Kondisi tersebut coba dibatasi mengingat memiliki pengaruh yang kuat pada mempengaruhi

²⁹ Fahrian Saleh, "Kritik Gus Yaqut Soal Populisme Islam, Begini Pemahaman Fadli Zon," kumparan, December 30, 2020.

³⁰ Amin Mudzakkir, "Populisme Islam Di Indonesia: Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Oleh Menteri Agama," alif, December 29, 2020.

³¹ Cnnindonesia, "Muhammadiyah Respons Menag Yaqut Soal Populisme Islam," cnnindonesia, December 28, 2020.

³² Lestari Ningsih, "Fachrul Razi Lengser Dari Jabatan Menag, Katanya Gara-Gara Kasih Lampu Hijau Ke FPI," wartaekonomi, January 3, 2021.

³³ Mudzakkir, "Populisme Islam Di Indonesia: Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Oleh Menteri Agama."

suatu kebijakan dan kondisi politik

Secara Institusional, institusi kementerian, khususnya Menteri Agama menjadi pengaruh kuat bagi wacana tersebut muncul. Apalagi diikuti dalam tataran institusi pemerintah yang memerangi adanya radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Institusi kepolisian sebagai pihak penyelenggara acara pun turut menjadi salah satu indikator penguat adanya wacana tersebut, mengingat institusi tersebut memiliki tujuan yang sama dalam memerangi aksi-aksi radikalisme. Secara sosial, isu politisasi agama dapat memperkuat adanya produksi narasi tersebut. Dalam pidato pertamanya Gus Yaquut setelah dilantik sebagai Menteri Agama, terdapat tiga fokus utama yang akan dilakukan pada saat mengembangkannya jabatan tersebut. Salah satunya ia menginginkan agar agama tidak lagi dijadikan sebagai alat politik. Termasuk sebagai alat untuk menentang pemerintah maupun dalam merebut kekuasaan.³⁴ Ini memberi maksud bahwa Gus Yaquut juga akan memerangi praktik-praktik politisasi agama yang selama ini terjadi di Indonesia. Politisasi agama akan terjadi apabila pada suatu perbuatan yang berkenaan mengenai hal-hal keagamaan berubah dan bersifat politik, sehingga hal tersebut bukan lagi bersifat keagamaan lagi melainkan berubah kearah yang politis.³⁵

D. KESIMPULAN

Narasi tentang populisme Islam yang diutarakan oleh Gus Yaquut sebagai menteri agama mengungkapkan adanya perseteruan ideologi utamanya di antara golongan-golongan Islam. Melalui narasi bahwa populisme Islam identik dengan radikalisme dan intoleransi, Gus Yaquut menempatkan dirinya sebagai representasi dari golongan yang anti-radikal dan toleran, di mana karakteristik tersebut sejalan dengan ideologi besar yang dipromosikan oleh negara. Melalui analisis wacana Gus Yaquut dengan pendekatan analisis wacana Norman Fairclough memunculkan beberapa point kenapa wacana tersebut lahir. Pertama, jika dilihat dari kondisi teks kebahasaannya, wacana tersebut memang ditunjukkan untuk menggambarkan eksistensi populisme Islam yang Radikal dan Intoleransi.

Kedua, pembahasan ini juga didukung dengan adanya praktik diskursus yang memberikan pemahaman mengapa teks tersebut diproduksi. Ini didasarkan pada beberapa sebab diantaranya pertama terkait pada identitasnya sebagai menteri agama yang harus sejalan dengan keinginan

³⁴ Nur Azizah, "Tiga Fokus Gus Yaquut Usai Dilantik Jadi Menteri Agama," medcom, December 22, 2020.

³⁵ Budi Kurniawan, "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (January 2018): 133–54, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>.

pemerintah dalam memberantas paham radikalisme dan intoleransi. Selain itu, identitas sebagai mantan ketua umum Gerakan Pemuda Anshor pun mempengaruhi produksi teks/narasi yang dibuat mengingat adanya keterkaitan dengan NU yang sedang adu wacana dengan GNPf-Ulama, sehingga produksi teks/narasi mengacu kepada penguatan NU. Kedua, pengalaman yang dimilikinya juga masih memiliki korelasi dengan identitas yang melekat. Diketahui bahwa GP Anshor dikenal dengan Ormas Islam yang sering melakukan penjagaan pada peribadahan agama di luar Islam. Pengalaman ini membentuk pengetahuan yang menekankan pada sikap moderat dalam beragama. Hal ini juga mampu membentuk pengetahuan yang kontra dengan sikap radikalisme dan intoleransi, sehingga kehadiran teks atau narasi tersebut juga didasarkan pada identitas, pengalaman dan pengetahuan si pembuat teks.

Tulisan ini memiliki keterbatasan terutama pada absennya wawancara dengan produsen teks sehingga maksud utama dibalik narasi tersebut terasa kurang begitu lengkap. Karena itu, penulis mengajukan saran bagi penelitian selanjutnya agar memasukkan narasi lain tentang populisme Islam untuk memperluas cakupan topik dan melengkapinya dengan metode wawancara dalam analisis wacana kritis Fairclough agar objek penelitian dapat digali secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatama, E. “Aksi 212, NU Imbau Warganya Tak Ikut Aksi karena Politis”. Tempo, 2020
- Azizah, N. “Tiga Fokus Gus Yaquut Usai Dilantik Jadi Menteri Agama”. Medcom, 2020.
- Basori, R. “Mengapa Banser-Anshor Menjaga Gereja? Jurnas”, 2017.
- Bonasir, R. “Dengan 212, umat Islam “ingin berkuasa lewat pilkada, pemilu dan pilpres.” Bbc, 2017.
- Cnnindonesia. “Muhammadiyah Respons Menag Yaquut soal Populisme Islam”. Cnnindonesia, 2020.
- Cnnindonesia. “Pakar LIPI Sebut Menag Yaquut Salah Paham soal Populisme Islam”. Cnnindonesia, 2020.
- Cnnindonesia. “PBNU Dukung Menag Yaquut soal Cegah Populisme Islam”. Cnnindonesia, 2020.
- Hadiz, V. R. “Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah (I)”. LP3ES, 2019.
- Hadiz, V. R., & Rakhmani, I. “Marketing morality in Indonesia’s democracy”. Asian Studies Association of Australia, 2017.
- Jayanto, D. D. “Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU)”. *Jurnal Filsafat*, 29, no.1, (2019): 1–25.
- Kami, I. M. “MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, ini isinya”. News.Detik, 2016.
- Kansong, U. “Populisme Islam”. Mediaindonesia, 2021.

- Kurniawan, B. "Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi". *Jurnal Sosiologi Agama*, 12, no. 1, (2019): 133–154. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>.
- Kusumo, R., & Hurriyah, H. (2018). "Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017". *Jurnal Politik*, 4, no. 1, (2019): 87–113. <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172>.
- Maulana, R. "Mahfud MD Buka-bukaan Alasan Pemerintah Bubarkan FPP". Nasional.Sindonews, 2021.
- Moffitt, B. "The Global Rise of Populism". Stanford University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvqsd8>, 2016.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. "Voices of the People: Populism in Europe and Latin America Compared". <https://www.researchgate.net/publication/265106779>, 2011.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. "Populism: A Very Short Introduction", 2017.
- Mudzakkir, A. "Populisme Islam di Indonesia: Apa yang sebaiknya Dilakukan oleh Menteri Agama". Alif, 2020.
- Ningsih, L. "Fachrul Razi Lengser dari Jabatan Menag, Katanya Gara-Gara Kasih Lampu Hijau ke FPP". Wartaekonomi, 2021.
- Putra, A. E. "Populisme Islam: Tantangan atau Ancaman bagi Indonesia?" *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15, no. 2, (2020): 218–227.
- R53. "Menag Yakut Tidak Paham Populisme Islam?" Pinterpolitik, 2020.
- Sinarpost. "Kembali Terancam Dibubarkan, Ini Sejarah dan Track Record FPP". Sinarpost, 2020.
- Wejnert, B. "Populism and Democracy: Not the Same but Interconnected", (2014): 143–161. <https://doi.org/10.1108/S0895-993520140000022006>
- Weyland, K. "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics". *Comparative Politics*, 34, no. 1, (2001): 1–22. <https://doi.org/10.2307/422412>
- Wibowo, E. A. "Menteri Agama Gus Yaqut: Saya Tidak Ingin Populisme Islam Berkembang Luas". Nasional.Tempo, 2020.